

ABSTRAK

MUHAMMAD AKRAM RAMADHANI, NPM 2022250, Judul: "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2022 PADA TAHAP PRABENCANA DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH". Pembimbing I: Bapak Barkatullah, S.Sos., M.A. dan Pembimbing II: Bapak Hendrayani, S.Sos., M.A.

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pada tahap prabencana di Kecamatan Amuntai Tengah. Kecamatan ini merupakan titik konfluensi dua sungai besar yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir luapan. Meskipun regulasi telah menetapkan prosedur mitigasi, secara empiris implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan teknis yang signifikan. Masalah utama yang teridentifikasi mencakup disfungsi instrumen *Early Warning System* (EWS) yang terbengkalai, keterbatasan cakupan program Desa Tangguh Bencana (DESTANA), serta rendahnya literasi bencana masyarakat yang cenderung menganggap banjir sebagai siklus musiman biasa tanpa kesiapsiagaan yang terencana.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan dari BPBD, aparatur kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles dan Huberman dengan membedah empat variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berjalan dengan kategori kurang baik yang mana dapat dilihat dari variabel komunikasi mengalami hambatan transmisi informasi, di mana kanal resmi pemerintah sering kali kalah cepat dibandingkan arus informasi relawan lokal. Pada variabel sumber daya, ditemukan ketiadaan staf teknis untuk pemeliharaan EWS serta orientasi anggaran yang masih bersifat reaktif pada tanggap darurat, belum berfokus pada langkah preventif. Variabel disposisi menunjukkan komitmen birokrasi yang masih terjebak dalam rutinitas administratif, sementara responsivitas petugas bersifat situasional tanpa SOP waktu yang baku. Pada variabel struktur birokrasi, fragmentasi koordinasi yang panjang menyebabkan ketidakefektifan sinkronisasi antara instansi kabupaten dan tingkat desa.

Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan pemerintah daerah untuk melakukan reorientasi paradigma anggaran ke arah preventif, menyusun SOP evakuasi yang baku, membentuk tim teknis khusus untuk pemeliharaan sarana vital, serta memperkuat sinergi koordinasi antar-instansi. Hal ini krusial untuk meminimalisir ketergantungan pada metode manual dan meningkatkan efektivitas pengurangan risiko bencana di Kecamatan Amuntai Tengah secara berkelanjutan bagi masyarakat. Langkah tersebut harus didukung dengan peningkatan edukasi publik agar kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan mandiri tumbuh secara kuat di akar rumput. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersinergi demi mencapai target mitigasi yang telah ditetapkan dalam regulasi daerah tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Prabencana, Penanggulangan Banjir.

ABSTRACT

MUHAMMAD AKRAM RAMADHANI, NPM 2022250, Title: "IMPLEMENTATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2022 ON THE PRE-DISASTER STAGE IN FLOOD MITIGATION IN AMUNTAI TENGAH DISTRICT." Supervisor I: Mr. Barkatullah, S.Sos., M.A. and Supervisor II: Mr. Hendrayani, S.Sos., M.A.

This study analyzes the implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regulation No. 6 of 2022 concerning disaster management, focusing specifically on the pre-disaster phase in Amuntai Tengah District. This district serves as a confluence point for two major rivers, rendering it highly vulnerable to overflow flooding. Although the regulation establishes clear mitigation procedures, empirical findings indicate that field implementation still faces significant technical obstacles. The primary issues identified include the dysfunction of neglected Early Warning System (EWS) instruments, limited coverage of the Disaster Resilient Village (DESTANA) program, and low community disaster literacy, where residents often perceive flooding as a normal seasonal cycle without planned preparedness.

This study employs a descriptive qualitative approach. Data were gathered through observation, in-depth interviews with informants from the Regional Disaster Management Agency (BPBD), district officials, village government, and the community, as well as documentation studies. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model by examining four policy implementation variables as proposed by George C. Edwards III: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results indicate that the policy implementation is categorized as suboptimal. This is evident in the communication variable, which faces information transmission obstacles, as official government channels are frequently outpaced by information flows from local volunteers. Regarding the resource variable, the study identified a lack of technical staff for EWS maintenance and a budgetary orientation that remains reactive to emergency response rather than focused on preventive measures. The disposition variable reveals a bureaucratic commitment trapped in administrative routines, while personnel responsiveness remains situational, lacking standardized response time SOPs. Furthermore, in the bureaucratic structure variable, prolonged coordination fragmentation leads to ineffective synchronization between regency agencies and the village level.

As a solution, this study recommends that the local government reorient its budgetary paradigm towards prevention, develop standardized evacuation SOPs, establish a specialized technical team for the maintenance of vital facilities, and strengthen inter-agency coordination synergy. These measures are crucial to minimize reliance on manual methods and improve the effectiveness of sustainable disaster risk reduction in Amuntai Tengah District. Such efforts must be supported by enhanced public education to foster strong awareness of independent preparedness at the grassroots level. All stakeholders are expected to collaborate to achieve the mitigation targets established by the local regulation.

Keywords: Policy Implementation, Pre-disaster, Flood Management.